



Analisis Pengambilan Keputusan Kebijakan Impor Beras dalam Konteks Pemenuhan Pangan Nasional di Indonesia

Ferdy Anton Adit Kurniawan^{1*}, Ilham Ramdhani², Revienda Anita Fitri³

^{1,2,3} Universitas Negeri Surabaya; ferdy.22146@mhs.unesa.ac.id, ilham.22134@mhs.unesa.ac.id, reviendafitrie@unesa.ac.id

Abstrak: Persoalan penentuan kebijakan impor beras dari negara lain untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh sektor pertanian dan industri pangan di Indonesia. Ada sejumlah permasalahan dan hambatan yang harus diatasi untuk melaksanakan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai impor beras. Menentukan efektivitas pengambilan keputusan pemerintah dalam impor beras adalah tujuan utama penelitian ini. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian kualitatif dengan terlebih dahulu menganalisis data yang sudah ada melalui tinjauan literatur, dan kemudian menerapkan teori yang sesuai pada data tersebut. Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini akan mengkaji kebijakan impor beras di Indonesia. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia terus-menerus memutuskan untuk mengimpor beras dalam jumlah yang bervariasi, yang berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi negara tersebut

Kata Kunci: Kebijakan, Impor Beras, Pengambilan Keputusan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v1i2.2394>

*Correspondensi: Ferdy Anton Adit Kurniawan

Email: ferdy.22146@mhs.unesa.ac.id

Received: 08-12-2024

Accepted: 13-01-2024

Published: 26-02-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *The issue of deciding on policies to import rice from other countries to maintain food security in Indonesia is one of several that the agriculture and food industry in Indonesia is still dealing with. There are a number of problems and hurdles that must be overcome in order to execute the Indonesian government's policy on rice imports. Determining the efficacy of government decision-making in rice imports is the primary objective of this study. This study employs a qualitative research strategy by first analyzing preexisting data via literature reviews, and then applying appropriate theories to the data. Building on prior research, this study will examine Indonesia's policy on rice imports. The study's findings suggest that the Indonesian government constantly decides to import varying quantities of rice, which has an effect on the country's social and economic conditions*

Keywords: Policy, Rice Imports, Decision Making

Pendahuluan

Karena sebagian besar masyarakat Indonesia bermatapencarian dari pertanian atau industri terkait, negara ini sering disebut sebagai negara dengan kekuatan pertanian. Sektor pertanian sangat penting bagi perekonomian suatu negara, karena negara memperoleh sebagian besar pendapatannya dari berbagai barang pertanian. Mayoritas masyarakat Indonesia bergantung pada beras sebagai sumber pangan utama, sehingga beras merupakan makanan pokok pertanian yang penting. Industri pertanian yang salah satu komponennya adalah beras, mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan negara. Meskipun lahan subur di Indonesia melimpah, negara ini mempunyai tantangan untuk memastikan warganya memiliki akses terhadap makanan bergizi (Suharyanto, 2011). Salah satu permasalahan yang masih

dihadapi industri pangan dan pertanian Indonesia adalah sulitnya menentukan kebijakan impor beras. Fakta bahwa Indonesia terus mengimpor beras dari negara lain merupakan indikator utama bahwa ketahanan pangan negara ini tidak terganggu. (Abidin, 2015)

Menelaah kebijakan seputar impor beras Penting untuk memahami proses pengambilan keputusan pemerintah Indonesia mengenai impor beras dan dampaknya terhadap kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Kondisi industri pertanian dan pangan di Indonesia saat ini, kondisi pasar beras domestik dan global, serta proses pengambilan keputusan pemerintah Indonesia sehubungan dengan impor beras akan dibahas dalam publikasi ini.

Indonesia mendapatkan pasokan beras dari negara tetangganya, Vietnam dan Thailand, sehingga negara ini dapat memastikan warganya selalu mendapat cukup makanan. Salah satu indikator penting pertumbuhan inflasi dalam negeri adalah sektor pangan, termasuk beras, dalam upaya mengendalikan inflasi dalam negeri. Sebagian besar asupan kalori harian penduduk Indonesia berasal dari nasi. Mayoritas masyarakat Indonesia masih mengandalkan beras sebagai sumber nutrisi utama. Produksi padi menurun seiring dengan beralihnya lahan sawah menjadi perumahan atau industri dan seiring dengan perubahan struktur perekonomian dari agraris menjadi non-agraris (Rahayu, 2019). Namun konsumsi pangan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di suatu daerah. Kemungkinan produksi beras dalam negeri akan mencukupi pada tahun 2021 untuk memenuhi permintaan dalam negeri, namun perlu adanya buffer beras impor agar pasokan lokal tidak menjadi terlalu langka. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memutuskan untuk membeli beras untuk mengisi persediaan beras yang diyakini masih mencukupi.

Sayangnya, produksi beras Indonesia tidak mampu memenuhi permintaan beras yang tinggi. Konsumsi beras per kapita tahunan di Indonesia terus meningkat, meskipun produksi beras masih jauh dari mampu memenuhi permintaan (Sari, 2014). Karena defisit tersebut, pemerintah memilih mengimpor beras dari negara lain. Untuk mencegah inflasi akibat menipisnya sumber daya beras lokal, pemerintah melakukan kegiatan impor dengan harapan pasokan beras akan mencukupi (Susanti, 2017).

Sebanyak 407,7 ribu ton beras diimpor pemerintah Indonesia pada tahun 2021. Khusus di kalangan petani dan analis kebijakan publik, program ini membawa sejumlah kelebihan dan kekurangan. Petani Indonesia khawatir harga pasar beras dan gabah akan turun akibat impor. Pasalnya, harga beras dalam negeri umumnya lebih mahal dibandingkan beras impor. Pendapatan petani juga akan menurun jika harga beras dan gabah turun. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan petani dan memperparah kemiskinan di pedesaan. Keputusan impor beras ini juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mencapai swasembada pangan. Banyak yang mempertanyakan mengapa pemerintah harus impor beras di saat Indonesia memiliki potensi untuk menghasilkan beras yang cukup untuk kebutuhan nasional. Meskipun pemerintah berupaya mencapai swasembada beras melalui kebijakan dan intervensi, harga, ketersediaan, dan permintaan beras selalu berubah (Siswanto, 2018). Pemerintah Indonesia mempunyai tantangan dalam menjamin

kesejahteraan petani dan konsumen beras karena ketidakseimbangan pasar beras dalam negeri yang disebabkan oleh dinamika tersebut.

Alasan terjadinya kontradiksi ini adalah karena pasokan beras lokal mencukupi dan musim panen telah dimulai, namun kedua hal tersebut tidak diperhitungkan pada tahap perencanaan impor beras. Program pemerintah nasional Food Estate yang berupaya meningkatkan kesejahteraan petani juga telah disebutkan oleh Presiden Joko Widodo. Pengelolaan pada akhirnya bergantung pada masing-masing petani, meskipun lazimnya dilakukan oleh organisasi petani dan komunitas (Tasya, 2023). Akibatnya, harapan-harapan tersebut akan melemahkan upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui pembahasan impor beras. Banyak masyarakat Indonesia yang kecewa karena pemerintah mereka tampaknya tidak peduli terhadap penderitaan petani lokal dan tidak berencana berbuat banyak untuk mengurangi kesenjangan pendapatan yang semakin besar di negara ini.

Beberapa peraturan diberlakukan pemerintah untuk mengatur impor beras. Nomor peraturan. 01/2018 Menteri Perdagangan yang mengatur tentang ekspor dan impor beras mengatur hal tersebut. Harus ada keseimbangan antara produksi dan konsumsi beras di Indonesia agar konsumsi beras yang tinggi dapat dipenuhi. Sehingga untuk menghindari terjadinya kekurangan pangan maka pemerintah harus memberikan perhatian yang baik (Zaeroni & Rustariyuni, 2016). Karena populasi dunia terus bertambah, kebutuhan akan beras akan selalu meningkat. Terdapat hampir 270 juta orang yang tinggal di Indonesia menurut Sensus Penduduk SP 2020. Oleh karena itu, strategi impor beras akan dilakukan oleh pemerintah jika permintaan beras tidak mencukupi (Paipan, 2020).

Pemerintah dan DPR mengesahkan UU 18/2012 tentang Pangan dan UU 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan UU 18/2012 dan 19/2013, negara bertanggung jawab untuk mengatur impor pangan, termasuk penetapan pungutan impor, untuk melindungi petani dan meningkatkan produksi pangan. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengatur tentang pengenaan tarif atau pungutan atas impor beras. Kebijakan impor beras merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan solusi multifaset. Untuk mencapai ketahanan pangan nasional yang optimal diperlukan upaya yang sinkron untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri, memperkuat cadangan pangan dalam negeri, dan mengembangkan kebijakan impor beras yang berkelanjutan. Misalnya dengan cara menentukan kuota impor beras berdasarkan kebutuhan dan mempertimbangkan dampaknya terhadap produksi padi domestik dan memberikan subsidi atau harga pembelian minimum yang menguntungkan petani.

Tujuan utama studi ini adalah menggunakan analisis data untuk menentukan, dari sudut pandang masyarakat umum, apakah kebijakan impor beras tahunan pemerintah Indonesia sudah tepat atau tidak. Selanjutnya, struktur tersebut dapat digunakan untuk mengkaji elemen-elemen yang berdampak pada keputusan kebijakan impor beras di Indonesia, menentukan bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada petani, konsumen, dan pemerintah, dan pada akhirnya, memberikan saran mengenai kebijakan yang paling efektif untuk menjamin ketahanan. makanan pokok. Mengingat para petani bersiap menyambut musim panen besar, tidak mengherankan jika beberapa pihak sangat

menentang strategi impor beras ini. Hal ini akan menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi petani.

Oleh karena itu, peneliti menggunakan teori rasionalitas yang dapat menjadi landasan penting dalam menganalisis keputusan kebijakan impor beras di Indonesia. Pengambil kebijakan dihadapkan pada pilihan rasional yang menyeimbangkan kebutuhan pasokan pangan nasional dengan stabilitas harga beras dan kesejahteraan petani. Pendekatan rasionalitas mengasumsikan bahwa pembuat kebijakan memilih opsi yang memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko. Dalam konteks ini, manfaat dievaluasi dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pangan nasional dengan harga yang stabil, sedangkan risiko dievaluasi dalam kaitannya dengan kemungkinan dampak negatif terhadap petani lokal. Keadaan ini menunjukkan bahwa petani belum mencapai tingkat kekayaan yang diinginkan. Instansi lain yang gagal memenuhi tanggung jawabnya untuk menjamin kesejahteraan warga negaranya adalah negara. (Alan, 2019).

Analisis rasionalitas memperhitungkan berbagai faktor, termasuk tingkat produksi beras dalam negeri, perkiraan permintaan beras dalam negeri, fluktuasi harga beras di pasar internasional, dan dampak impor beras terhadap harga dan pendapatan petani. Para pembuat kebijakan menggunakan data dan informasi ini untuk memprediksi hasil dari setiap pilihan kebijakan dan memilih pilihan yang mereka yakini akan memberikan dampak terbaik bagi negara. Fokus penelitian ini dikaji menggunakan teori pengambilan keputusan rasional. Untuk memilih solusi terbaik terhadap suatu masalah, pengambil keputusan rasional menggunakan proses yang melibatkan penentuan kebutuhan masalah, melakukan brainstorming solusi potensial, dan akhirnya memilih solusi terbaik dengan mempertimbangkan pro dan kontra dari setiap pilihan berdasarkan prinsip-prinsip yang ada. analisis sebab-akibat (Mulyono, 2009). Sejauh mana kebijakan impor beras yang diambil pemerintah dapat memenuhi kebutuhan pangan nasional? Teori ini dapat membantu menjawab pertanyaan tersebut dengan menyatukan unsur-unsur teoritis yang relevan.

Metode

Peneliti dalam penelitian ini mengandalkan teknik kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti memegang peranan penting dalam menganalisis keadaan objek alam (Sugiyono, 2008). Penelitian ini menggunakan tinjauan pustaka yang memanfaatkan data yang dikumpulkan sebelumnya dan mengevaluasinya berdasarkan kerangka teori yang dapat diterapkan. Menurut Miles dan Huberman (1994), penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali secara mendalam nuansa objek penelitian guna mendapatkan pengetahuan yang mendalam terhadapnya. Kebijakan pemerintah Indonesia mengenai impor beras telah banyak diteliti. Penyebab mendasar pada periode 2009 hingga 2011 yaitu kebijakan impor beras Indonesia dari Thailand dikaji dalam penelitian Citra Syafni Dewi dan Indra Pahlawan. Para peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi alasan mendasar di balik keputusan pemerintah Indonesia membeli beras dari Thailand. Indonesia harus mengimpor beras dari negara-negara seperti Thailand karena produksi dalam negeri tidak dapat memenuhi permintaan dari jumlah penduduk yang besar. Sebagian besar masyarakat

Indonesia mengandalkan beras sebagai sumber nutrisi utama, sehingga hal ini tidak mengherankan. Akibatnya, Indonesia harus bergantung pada impor dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan beras yang sangat besar (Indra Pahlawan, 2018). Selanjutnya, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur Hamidah Wahit (2015) menunjukkan bahwa kebijakan tersebut diberlakukan untuk mengatasi permintaan beras lokal dan korupsi yang terjadi di kalangan pejabat pemerintah yang terlibat dalam perumusan peraturan mengenai impor beras. Faktor eksternal, seperti perubahan iklim dan perbaikan pertanian Thailand, dan faktor internal, seperti penurunan produksi beras nasional dan peningkatan konsumsi beras nasional serta pertumbuhan ladang yang asimetris dan pergeseran sistem perekonomian dari pertanian dan terhadap manufaktur, menurut penulis, menginformasikan kebijakan impor beras Indonesia ke Thailand. Olhviany Beatrix Lopang (2016) melakukan penelitian yang menganalisis dan mengetahui bagaimana nilai tukar, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, dan output beras mempengaruhi impor beras Indonesia. Di antara variabel-variabel utama yang mempengaruhi impor beras Indonesia dari tahun 2000 hingga 2014, studi ini menemukan bahwa jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif, sedangkan nilai tukar, pendapatan per kapita, dan produksi beras tidak berpengaruh sama sekali. Hasil perjanjian bilateral menunjukkan dampak kolaborasi Indonesia dan Thailand, menurut penelitian Kenedy Boy L. Agar beras Indonesia bisa bersaing dengan beras internasional, kedua pemimpin negara ini telah melakukan sejumlah langkah untuk meningkatkan kualitas beras komoditas melalui kemitraan mereka dengan Thailand. (Boy, 2017).

Studi yang dilakukan oleh Galuh Octania mengkaji strategi pemerintah Indonesia untuk menjaga keseimbangan output beras dalam negeri dari tahun 2017 hingga 2019 dan menggali rantai pasokan beras yang dibeli oleh pemerintah. Untuk lebih membantu pemerintah Indonesia dalam mengamankan rantai pasokan beras, diperlukan lebih banyak saran. Untuk mencegah perselisihan mengenai pasokan beras suatu negara dan memastikan bahwa negara mampu mengatasi kesenjangan produksi beras secara memadai (Octania, 2021). Kemudian, penelitian Andri Watto Putra menyelidiki dampak impor beras Thailand terhadap ketahanan pangan Indonesia dan bagaimana impor beras tersebut membantu menjaga negara ini tetap stabil antara tahun 2011 dan 2012. Sederhananya, pembatasan impor beras akan menyebabkan penurunan stok beras nasional, yang pada gilirannya akan menyebabkan penurunan stok beras nasional. dapat menyebabkan inflasi meningkat (Putra, 2019). Penelitian Asran Jalal menyelidiki pentingnya impor beras ke Indonesia dan mengkaji alasan-alasan yang mungkin akan mempertahankan impor beras pada tahun 2021. Impor beras ke negara ini akan merugikan perekonomian dan kehidupan petani lokal. Meski begitu, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan produksi dalam negeri untuk menjaga pasokan beras tetap stabil (Jalal, 2022). Selanjutnya, penelitian Jiuhardi bertajuk "Analisis kebijakan impor beras untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia" mendalami kebijakan impor beras pemerintah yang bertujuan untuk menstabilkan harga dan memastikan stok beras aman dalam kondisi tertentu, semua karena tingginya permintaan. beras di kalangan penduduk Indonesia. Oleh karena itu, harus ada keseimbangan antara jumlah barang dagangan yang diberikan dan jumlah barang yang

dibutuhkan. Kebijakan impor beras ke Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup petani Indonesia juga dievaluasi dalam hal ini. Kebijakan impor beras berpotensi mempengaruhi harga gabah dan beras di tingkat petani, yang pada akhirnya dapat menyebabkan perubahan kesejahteraan di tingkat petani.

Pembahasan dan informasi mengenai kerjasama Indonesia dengan negara lain dalam impor beras dapat dibangun berdasarkan kajian sebelumnya. Penelitian ini akan melanjutkan kajian tentang kebijakan impor beras di Indonesia dengan mempertimbangkan temuan-temuan dari penelitian terdahulu. Peneliti mendapatkan temuan baru di tahun 2024 yakni pemerintah melakukan impor beras kurang lebih sebanyak 5 juta ton, hal tersebut merupakan impor beras dengan peningkatan terbanyak dari tahun sebelumnya yang justru merupakan peningkatan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyelidiki lebih jauh tujuan pemerintah Indonesia terkait upaya impor beras di masa depan. Mengetahui kebijakan tahunan pemerintah Indonesia mengenai impor beras ke Indonesia, khususnya pada tahun 2016–2024, menjadi tujuan utama penelitian ini. Untuk menjaga harga pangan tetap stabil dan meningkatkan kesejahteraan petani, studi ini diharapkan dapat memberikan saran kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan impor beras merupakan isu penting dalam konteks pemenuhan pangan nasional di Indonesia. Di satu sisi, impor beras diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasar. Di sisi lain, impor beras dapat memberikan dampak negatif terhadap petani lokal dan ketahanan pangan negara. Analisis terhadap keputusan kebijakan impor beras penting untuk memahami faktor-faktor yang mendasari serta dampak positif dan negatifnya. Hasil analisis ini akan membantu pemerintah menyusun kebijakan impor beras yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan pangan nasional.

Setiap orang di bumi mempunyai kebutuhan pokok akan makanan, tidak terkecuali beras. Di antara banyaknya makanan yang umum disantap di Indonesia, nasi menjadi andalan. Indonesia bergantung pada negara tetangganya, Vietnam dan Thailand, sebagai sumber impor beras dalam negeri. Harapan akan mencukupinya pasokan beras di dalam negeri menjadi alasan dilakukannya kegiatan impor ini. Intinya, pasokan beras suatu negara dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan berasnya. Namun, untuk amannya, Anda harus menyiapkan nasi tambahan. Dalam upaya mengatasi kekurangan tersebut, pemerintah Indonesia memulai program impor beras. Semua keputusan nasional tunduk pada kebijakan pemerintah. Kepentingan nasional yang mendesak telah menyebabkan kesulitan ini. Asumsi yang melatarbelakangi kegiatan impor ini adalah tersedianya pasokan beras dalam negeri yang cukup untuk mencegah inflasi dalam negeri akibat kekurangan beras dalam negeri. Meskipun beras merupakan bagian penting dalam upaya mengendalikan inflasi, fakta bahwa beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa inflasi masih terus meningkat.

Analisis pengambilan keputusan kebijakan impor beras dalam konteks pasokan pangan nasional memberikan wawasan tentang bagaimana pemerintah Indonesia mengambil keputusan impor beras dan bagaimana dampaknya terhadap pasokan pangan nasional. Untuk menjaga ketahanan pangan lokal, Indonesia mengimpor beras dari negara tetangga, terutama Vietnam dan Thailand. Industri makanan dipandang sebagai prediktor utama pertumbuhan inflasi dalam negeri, yang sangat penting untuk mengendalikan inflasi. Salah satu makanan pokok yang sehari-hari diandalkan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan gizinya adalah nasi. Meski begitu, nasi merupakan makanan penting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Konsumsi pangan suatu wilayah meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, namun menurun seiring dengan laju reklamasi lahan sawah untuk perumahan dan industri, serta laju diversifikasi ekonomi dari sektor pertanian. Itu mengarah ke Produksi padi (Rahayu, 2019).

Kemungkinan produksi beras dalam negeri akan mencukupi pada tahun 2021 untuk memenuhi permintaan dalam negeri, namun perlu adanya buffer beras impor agar pasokan lokal tidak menjadi terlalu langka. Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengimpor beras untuk mengisi kesenjangan pasokan dalam negeri. Hal ini dilakukan untuk bersiap menghadapi kekurangan pangan yang akan terjadi di Indonesia. Namun, keuntungan dan kerugian dari strategi impor beras ini telah memicu diskusi hangat, terutama mengingat epidemi yang terjadi saat ini. Anda boleh saja setuju atau tidak setuju dengan kebijakan ini (Simanjuntak, 2020). Apalagi, pemerintah memilih mengimpor beras saat petani sedang panen raya. Usulan impor beras disampaikan Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pemerintah menerapkan program ini untuk menjamin pasokan beras yang stabil, yang sangat penting selama epidemi. Karena kekhawatiran akan kelaparan masih terus terjadi (Salim, 2021). Selain itu, dengan harapan dapat meningkatkan kinerja perekonomian negara, Kebijakan Impor Beras juga diterapkan untuk menjamin kecukupan pasokan beras pada tahun 2021.

Karena produksi beras nasional meningkat dibandingkan tahun lalu, para petani dibingungkan dengan kebijakan impor beras. Hampir 29,76% penduduk Indonesia terlibat dalam pertanian pada tahun 2017, menurut statistik BPS. Dengan demikian, kesejahteraan 31,68 juta orang (petani) akan menurun jika terjadi operasi impor beras. Ada beberapa alasan pemerintah mengambil kebijakan impor beras. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menjaga pasokan beras tetap stabil, menjaga harga tetap stabil, memastikan pasokan tetap stabil, dan bersiap menghadapi potensi kekurangan pangan yang disebabkan oleh epidemi. Selain itu, cuaca juga berperan; memperkirakan hasil beras kini tidak mungkin dilakukan karena curah hujan yang berlebihan di beberapa daerah (CNN Indonesia, 2021). Namun, terdapat banyak pihak yang menentang kebijakan impor beras, dan mereka mempunyai alasan yang kuat untuk menentangnya. Informasi pertama adalah bahwa produksi beras nasional dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan tahunan, menurut statistik BPS. Pada tahun 2019, produksi beras nasional mencapai 31,31 juta ton, dan jumlah tersebut akan meningkat menjadi 31,33 juta ton pada tahun 2020. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya menggunakan statistik BPS sebagai acuan dalam menetapkan

undang-undang impor beras. Fakta bahwa 4,8 juta ton beras tambahan mungkin dihasilkan selama musim panen saat ini juga merupakan faktor lain.

Sambil mempertimbangkan argumen yang mendukung dan menentang impor beras, penting untuk memperhatikan situasi pangan di Indonesia. Meskipun hasil padi meningkat, populasi dunia terus bertambah. Untuk menjamin kestabilan pasokan beras di Indonesia, salah satu alternatifnya adalah dengan mengimpor gabah. Di sisi lain, ada pula yang penasaran dengan rencana menuju kemandirian pangan yang realistis, meski pesimistis. Industri pertanian di Indonesia menawarkan potensi besar yang belum dimanfaatkan bagi negara ini untuk mencapai swasembada pangan. (Chaireni, 2020).

Pemerintah Indonesia harus memikirkan secara serius pilihan strategis impor beras karena berdampak pada kepentingan nasional. Mayoritas penduduk Indonesia adalah petani, sehingga negara ini dapat memenuhi kebutuhan beras tertinggi dengan tetap memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Namun hal itu bisa dibilang masih terhambat dikarenakan kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola barang mentah menjadi barang setengah mentah maupun menjadi barang jadi masih belum memenuhi. Namun permasalahan tersebut sebenarnya masih bisa teratasi dengan beberapa cara dengan tanpa melakukan impor beras dari luar negeri. Pemerintah bisa melakukan beberapa kebijakan yang mungkin bisa dibilang efektif jika dilakukan salah satunya dengan meningkatkan sumber daya manusia terutama kepada para petani. Petani dalam hal ini bisa diberikan pembekalan dan pelatihan mengenai cara bertani yang benar dan juga bagaimana agar mereka para petani bisa mengelola hasil panennya menjadi bahan setengah jadi maupun bahan yang jadi. Dengan begitu produksi beras akan bisa stabil.

Demi menjaga kestabilan harga beras lokal, pemerintah Indonesia memilih mengimpor beras. Tujuannya adalah untuk menghindari kelangkaan beras, yang jika dibiarkan dapat menyebabkan kenaikan harga dan inflasi. Pemerintah Indonesia memilih mengimpor beras untuk memenuhi permintaan lokal dan menjaga harga beras tetap stabil, dengan mempertimbangkan kekhawatiran yang disebutkan sebelumnya. Demi melindungi kepentingan Indonesia dan mewujudkan kehidupan warganya yang lebih baik, pemerintah harus mengambil pilihan strategis tersebut. Selain itu, pemerintah juga melakukan impor beras untuk menjaga harga beras dalam negeri tetap stabil. Meskipun ada pula yang berpendapat bahwa spekulasi adalah penyebab lonjakan harga beras baru-baru ini. Masyarakat dapat dengan mudah mempengaruhi harga pasar karena banyaknya beras yang diandalkan masyarakat. Mengingat petani merupakan konsumen sekaligus produsen, maka mustahil melihat tingginya harga beras secara positif. (Rahayu, 2019).

Alasan Pemerintah Memutuskan untuk Melakukan Kebijakan Impor Beras

(1) meningkatnya permintaan beras. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan konsumsi beras per kapita, permintaan beras di Indonesia juga meningkat. Oleh karena itu, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri adalah dengan mengimpornya. (2) Tidak cukupnya padi yang dipanen. Bahkan saat ini, produksi beras dalam negeri Indonesia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan negara. Bencana alam, perubahan iklim, dan permasalahan pengelolaan lahan pertanian hanyalah beberapa

variabel yang mungkin berdampak pada produksi beras Indonesia. (3) Stabilitas harga beras. Kemudian terdapat faktor-faktor lain yang mendasari kebijakan impor beras yaitu ketersediaan beras di pasar domestik yang juga menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan impor beras. Ketika produksi beras domestik tidak mencukupi kebutuhan konsumsi nasional, impor beras diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan menghindari kekurangan pangan. Kemudian adanya fluktuasi harga beras di pasar domestik juga menjadi faktor penting. Ketika harga beras naik secara signifikan, pemerintah dapat melakukan impor beras untuk menstabilkan harga dan melindungi konsumen. Kemudian ada ketahanan pangan yang merupakan tujuan utama dari kebijakan impor beras. Pemerintah perlu memastikan bahwa impor beras tidak membahayakan ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani lokal.

Dampak Kebijakan Impor Beras di Indonesia

Kebijakan impor beras di Indonesia selalu menjadi isu yang kompleks dan multidimensi, dengan dampak yang luas bagi berbagai pihak. Berikut analisis mendalam mengenai dampak kebijakan ini:

A. Dampak Positif:

1. Menjaga Stabilitas Harga Pangan. Impor beras dapat membantu menstabilkan harga beras di pasaran ketika terjadi kekurangan pasokan domestik, seperti saat musim paceklik atau bencana alam. Hal ini membantu menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok miskin dan rentan.
2. Menurunkan Inflasi. Stabilisasi harga beras dapat berkontribusi pada penurunan inflasi secara keseluruhan, yang berdampak positif pada stabilitas ekonomi makro.
3. Memenuhi Kebutuhan Konsumen. Impor beras dapat membantu memenuhi kebutuhan konsumsi beras nasional, terutama ketika produksi domestik tidak mencukupi. Hal ini penting untuk memastikan ketahanan pangan nasional.
4. Meningkatkan Kesejahteraan Petani. Dalam beberapa kasus, impor beras dapat membantu meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini terjadi ketika harga beras impor lebih tinggi daripada harga pembelian pemerintah untuk gabah petani.

B. Dampak Negatif:

1. Merugikan Petani Domestik. Impor beras dapat menekan harga beras di pasaran domestik, yang berakibat pada kerugian bagi petani lokal. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pendapatan dan disinsentif untuk bercocok tanam padi.
2. Memperlemah Ketahanan Pangan Nasional. Ketergantungan berlebihan pada impor beras dapat melemahkan ketahanan pangan nasional. Hal ini membuat negara rentan terhadap fluktuasi harga dan pasokan beras di pasar internasional.
3. Menghambat Pertumbuhan Sektor Pertanian. Impor beras yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan sektor pertanian padi di Indonesia. Hal ini karena petani lokal akan kesulitan bersaing dengan beras impor yang lebih murah.

4. Menimbulkan Kerugian Ekonomi. Impor beras dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara, karena devisa negara harus dikeluarkan untuk membeli beras dari luar negeri.

Jadi, Kebijakan impor beras memiliki dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Dampak tersebut perlu dikaji secara cermat dan komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kondisi pasokan dan permintaan beras domestik, harga beras di pasaran internasional, dan kondisi ekonomi makro secara keseluruhan. Pemerintah perlu menerapkan kebijakan impor beras yang tepat dan terukur agar dapat mencapai keseimbangan antara menjaga stabilitas harga pangan, melindungi petani lokal, dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pemerintah Indonesia melalui kementerian pertanian kerap sekali melakukan keputusan untuk melakukan impor beras dari tahun-ketahun. Menurut Badan Pusat dan Statistik (BPS), Pada tahun 2019 indonesia mengimpor beras sebanyak 444 ribu ton, 356 ribu ton pada 2020, 407,7 ribu ton pada 2021, 429 ribu ton pada 2022, 3,06 juta ton pada 2023, dan kurang lebih 3,6 juta ton pada tahun 2024.

Tabel 1. Jumlah Impor Beras Indonesia dalam Ton Pada Tahun 2019-2024

No	Tahun	Jumlah/Ton
1	2019	444 ribu
2	2020	356 ribu
3	2021	407,7 ribu
4	2022	429 ribu
5	2023	3,06 jt
6	2024	3.6 jt

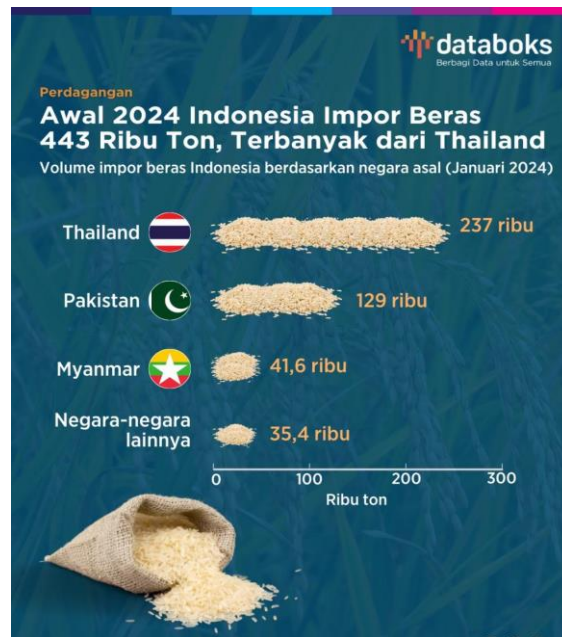
Sumber: Diolah peneliti dari berbagai macam sumber (2024)

Berdasarkan data tersebut terjadi kenaikan yang cukup besar dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2024 sebanyak 3,6 juta ton. 3,6ton pada tahun 2024 tersebut terpicu akibat keputusan dari kebijakan pemerintah pada awal bulan januari 2024 yang mana pemerintah mengimpor 43 ribu ton beras dengan nilai US\$279 juta. Angka tersebut berbeda sekitar 82% dari tahun 2023 lalu yang mana pemerintah pada bulan januari 2023 hanya mengimpor 243,66 ribu ton saja.

Pemerintah kembali mengumumkan kuota impor beras pada tahun 2024 kurang lebih sebanyak 3 juta ton. Sebagian beras impor (2 juta ton) dijadwalkan tiba antara Januari hingga Maret 2024. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, dan Perm Blog mengklaim impor beras dilakukan pada tahun politik ini untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan kebutuhan masyarakat. Jumlah beras yang diimpor pemerintah pada tahun 2024 sebenarnya terbilang aneh. Pemerintah mengklaim situasi tersebut tidak normal akibat fenomena El Niño. Hal ini terus dikonfirmasi oleh pemerintah, namun data iklim menyebutkan keadaan akan kembali normal pada tahun 2024. Klaim pemerintah bahwa

produksi beras menurun tidak berdasar dan tidak bisa digunakan sekadar untuk melegalkan impor saja.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, volume impor beras Indonesia pada Januari 2024 mencapai 443 ribu ton dengan nilai US\$279,2 juta. Volumennya naik sekitar 82% dibanding impor beras Januari 2023 yang hanya 243,66 ribu ton. Kemudian nilainya meningkat sekitar 135%.



Gambar 1. Jumlah Impor Beras Indonesia Awal Tahun 2024
 Sumber: Badan Pusat Statistika (2024)

Berdasarkan hal tersebut, ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti produktivitas pertanian dalam negeri yang belum optimal, pertumbuhan populasi, atau perubahan pola konsumsi masyarakat. Meskipun Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas, ketergantungan pada impor beras dapat menjadi masalah jangka panjang dalam hal ketahanan pangan dan kemandirian pangan nasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dalam negeri, mendukung petani lokal, serta mengembangkan teknologi dan infrastruktur yang lebih baik untuk memperkuat sektor pertanian. Selain itu, diversifikasi sumber beras impor juga penting untuk mengurangi risiko ketergantungan pada satu atau dua negara pemasok utama. Hal ini dapat meningkatkan ketahanan pangan dan menjaga stabilitas pasokan beras di Indonesia.

Tabel 2. Anggaran Impor Beras Pada Awal Tahun 2024

No	Negara	Volume	Nilai
1	Thailand	237rb/ton	US \$153
2	Pakistan	129rb/ton	US \$79,3
3	Myanmar	41,6rb/ton	US \$23,98
4	Negara Lain	35,4rb/ton	US \$22,92

Sumber: Badan Pusat Statistika Indonesia

Thailand menyumbang 237,00 metrik ton (atau 153,000,000 USD) impor beras, diikuti oleh Pakistan dengan 130,000 metrik ton (atau 79.3,000,000 USD), Myanmar dengan 41,600 metrik ton (atau 35,400 USD), dan negara-negara lain dengan 35,400 metrik ton (atau 22.92.000.000 USD) impor beras. Dapat dilihat bersama bahwa dari tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah beras yang diimpor dari beberapa negara. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2024 saat ini. Hal tersebut dapat dilihat pada awal bulan januari indonesia mengimpor beras sekitar 443 ribu ton dengan negara pengekspor terbanyak dari thailand. Petani dan pemerintah dalam dalam hal ini tentu sangat dirugikan. Bagi petani sendiri ketika impor ini dilakukan harga jual padi mereka akan turun dan itupun belum lagi kalau hasil panen mereka bagus. Ketika harga jual turun dan disertai dengan gagal panen maka hal ini akan semakin menyengsarakan para petani. Begitu juga dengan pemerintah, ketika pemerintah terlalu banyak dalam meningkatkan impor beras, maka mereka akan banyak dirugikan dalam hal pengeluaran anggaran pemerintah. Padahal anggaran pemerintah sudah banyak dikeluarkan juga untuk meningkatkan produksi tanaman petani, seperti salah satunya melakukan subsidi pupuk. Dalam hal ini pemerintah plin plan, mereka berharap besar agar produksi petani meningkat dengan melakukan subsidi-subsidi, namun mereka malah meningkatkan impor besar dalam jumlah yang cukup tinggi. Ketika petani mengalami surplus panen mereka tentu akan sejahtera, namun apabila harga padi turun akibat impor yang terlalu banyak, maka tingkat kesejahteraan petani juga akan menurun.

Pada tahun 2024, Kementerian Perdagangan secara bertahap memberikan izin impor beras sebanyak 3,6 juta ton. Menurut Isy Karim, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, jumlah tersebut meningkat dari impor beras sebanyak 3,5 juta ton pada tahun 2023. Menurut Isy Karim, pemberian izin impor tersebut diberikan kepada Perum Bulog sebagai tugas untuk meningkatkan stok beras masyarakat. Hal ini akan memungkinkan mereka mengantisipasi kenaikan harga di masa depan.

Gambar 2. Kenaikan Impor Beras dari 2023-2024



Sumber: Infografis.okezone

Berdasarkan gambar tersebut, kenaikan izin impor beras tahun 2024 menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia sedang berusaha untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan cadangan beras di tengah masyarakat. Peningkatan cadangan beras diharapkan dapat membantu mengendalikan harga beras yang cenderung naik belakangan ini. Kenaikan harga beras disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah tingginya permintaan gabah di Indonesia, baik dari rumah tangga maupun dunia usaha. Cuaca, hama, penyakit, dan bencana alam hanyalah beberapa variabel yang mempengaruhi produksi beras di Indonesia. Fluktuasi harga beras disebabkan oleh perubahan produksi beras. Pupuk, insektisida, dan benih—bahan baku yang digunakan untuk menanam padi—semuanya mengalami kenaikan harga dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini berdampak pada harga jual beras dengan meningkatkan biaya produksinya.

Oleh karena itu, Pemerintah dalam mengambil keputusan dituntut untuk dapat rasional dan efektif terhadap kedua konteks ini, agar tidak terjadi ketimpangan antara kesejahteraan petani dan juga pemenuhan pangan nasional. Dalam hal ini pemerintah bisa banyak melakukan inovasi-inovasi yang relevan tanpa merugikan antara kedua belah pihak, kestabilan harga padi dan beras harus benar-benar bisa normal agar tidak merugikan masyarakat dan juga pemerintah dalam hal pengeluaran anggaran.

Kesimpulan

Pengambilan keputusan pemerintah dalam melakukan kebijakan impor beras dalam konteks pemenuhan pangan nasional memberikan wawasan tentang bagaimana pemerintah Indonesia mengambil keputusan impor beras dan dampaknya terhadap pasokan pangan nasional. Ada keyakinan bahwa produksi beras dalam negeri cukup untuk memenuhi kebutuhan, namun penting untuk memiliki cadangan jika terjadi kekurangan. Untuk menjamin pasokan pangan yang stabil di dalam negeri, pemerintah Indonesia membeli beras dari negara tetangga, Vietnam dan Thailand. Kebijakan ini memunculkan perdebatan pro dan kontra terutama di masa pandemi. Para petani sering merasa bingung karena produksi beras nasional meningkat namun impor masih diperlukan untuk menjaga ketersediaan stok yang dirasa kurang. Alasan pemerintah Indonesia memutuskan impor beras adalah meningkatnya permintaan beras, produksi padi yang tidak mencukupi, serta stabilitas harga beras. Meskipun produksi beras nasional meningkat setiap tahun, namun jumlah penduduk juga terus bertambah, sehingga impor beras dianggap sebagai solusi untuk menjaga pasokan beras. Walaupun beberapa masyarakat menentang kebijakan impor beras, pemerintah tetap melakukan kebijakan tersebut untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan beras di Indonesia. Hal ini merupakan keputusan strategis untuk menjamin kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Analisis pengambilan keputusan kebijakan impor beras menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan. Kebijakan impor beras harus dilakukan dengan hati-hati dan terukur agar dapat mencapai tujuan pemenuhan pangan nasional tanpa membahayakan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani lokal. Dalam mengambil keputusan untuk melakukan impor beras, pemerintah perlu

mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan produksi beras dalam negeri, permintaan pasar, stabilitas harga, dan kesejahteraan petani. Dengan inovasi dan kebijakan yang tepat, diharapkan masalah impor beras dapat diselesaikan tanpa merugikan kedua belah pihak, sehingga kestabilan pasokan beras dan harga beras dapat terjaga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abidin. (2015). Dampak Kebijakan Impor Beras dan Ketahanan Pangan Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial. *Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*. <https://doi.org/10.33007/INF.V1I3.168>
- Alan, M. F. (2019, Juni). Kebijakan Impor Beras Di Indonesia. 6(1), 24 - 45.
- Boy. (2017). *Implementasi Kerjasama Indonesia Dan Thailand Di Bidang Pertanian Tahun 2010-2014 (Studi Kasus Peningkatan Kualitas Beras)*.
- Chaireni. (2020). Ketahanan Pangan Berkelanjutan. 70–79. <http://jkpl.ppj.unp.ac.id/index.php/JKPL/article/view/13>
- Indra. (2018). Landasan Faktor Kebijakan Impor Beras Indonesia Asal Thailand pada Tahun 2009 – 2011. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1-11. <https://jnse.ejournal.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/18248>
- Jalal. (2022). Dinamika Politik Proses Keputusan Impor Beras Tahun 2018 Dan Tahun 2021. 3. <https://doi.org/10.47313/PJSH.V7I2.1857>
- Lopang, O. B. (2016). Analisis Impor Beras di Indonesia Tahun 2000-2014. *In Skripsi Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage.
- Mulyono. (2009, June 8). Teori Pengambilan Keputusan (Theory of Decision Making) - Free Writing In The Wall. *free writing in the wall*. <https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/06/08/teori-pengambilan-keputusan-theory-of-decision-making/>
- Octania. (2021). "Peran Pemerintah Dalam Rantai Pasok Beras Indonesia".
- Paipan. (2020). (Determinan Ketergantungan Impor Beras di Indonesia (Determinants of Rice Import Dependency in Indonesia).
- Putra. (2019). Dampak Impor Beras Dari Thailand Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia Tahun 2011-2012.
- Rahayu, S. E. (2019, Oktober 5). Analisis Perkembangan Produksi Beras Dan Impor Beras Di Indonesia. 1(1), 219-226.
- Salim. (2021, September 7). *Polemik Impor Beras 1 Juta Ton Di Masa Pandemi*. <https://misekta.id/news/polemik-impor-beras-1-jutaton-di-masa-pandemi>
- Sari, R. K. (2014, Juni). *ANALISIS IMPOR BERAS DI INDONESIA*, 3(2), 322.
- Simanjuntak. (2020). "Kesejahteraan Petani Dan Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi Covid-19: Telaah Kritis Terhadap Rencana Megaproyek Lumbung Pangan Nasional Indonesia". *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 6(2), 184–204. <https://doi.org/10.33007/INF.V6I2.2332>

- Siswanto, E. (2018, Agustus). "Dampak Kebijakan Perberasan pada Pasar Beras dan Kesejahteraan Produsen dan Konsumen Beras di Indonesia". 23(2), 93-100.
- Sugiyono. (2008). Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D.
- Suharyanto. (2011). Pengaruh Produksi dan Konsumsi Terhadap Impor Beras di Provinsi Jambi Tahun 2010-2016. *Manajemen Dan Sains*. <https://doi.org/10.33087/jmas.v4i1.88>
- Susanti, I. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Beras Impor di Jawa Timur. 2(25). <https://doi.org/10.30736/JPENSI.V2I1.93>
- Tasya. (2024, April 24). Kondisi Petani Makin Sulit di Tengah Ancaman Perubahan Iklim dan Persoalan Ketahanan Pangan. *Universitas Gadjah Mada*. <https://ugm.ac.id/id/berita/kondisi-petani-makin-sulit-di-tengah-ancaman-perubahan-iklim-dan-persoalan-ketahanan-pangan/>
- Zaeroni, & Rustariyuni. (2016). Pengaruh Produksi Beras, Konsumsi Beras Dan Cadangan Devisa Terhadap Impor Beras di Indonesia.
- Baird, I. G. (2022). Labour, mechanization, market integration, and government policy: Agrarian change and lowland rice cultivation in northeastern Thailand and southern Laos. *Journal of Agrarian Change*, 22(2), 278–298. <https://doi.org/10.1111/joac.12452>
- Balié, J. (2020). Domestic and international impacts of the rice trade policy reform in the Philippines. *Food Policy*, 92. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.101876>
- Jiang, M. (2019). Paddy rice multiple cropping index changes in Southern China: Impacts on national grain production capacity and policy implications. *Journal of Geographical Sciences*, 29(11), 1773–1787. <https://doi.org/10.1007/s11442-019-1689-8>
- Laiprakobsup, T. (2019). The policy effect of government assistance on the rice production in Southeast Asia: Comparative case studies of Thailand, Vietnam, and the Philippines. *Development Studies Research*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.1080/21665095.2019.1568900>
- Pandey, S. (2020). Why technologies often fail to scale: Policy and market failures behind limited scaling of alternate wetting and drying in rice in Bangladesh. *Water (Switzerland)*, 12(5). <https://doi.org/10.3390/w12051510>
- Panyasing, S. (2022). The Government Policy on the Organic Rice Farming Groups Embracing Sustainable Agricultural Production: Evidence in Thailand. *AgBioForum*, 24(1), 83–94.
- Rondhi, M. (2019). Assessing the role of the perceived impact of climate change on national adaptation policy: The case of rice farming in Indonesia. *Land*, 8(5). <https://doi.org/10.3390/land8050081>
- Yu, Y. (2022). Rice yield response to climate and price policy in high-latitude regions of China. *Food Security*, 14(5), 1143–1157. <https://doi.org/10.1007/s12571-021-01253-w>